

**BAB IV**  
**ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**  
**TAHUN 2006-2026**

Visi Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan adil, sebagai jabaran dari tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Visi pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam arah pembangunan jangka panjang sebagaimana berikut.

**4.1. MEWUJUDKAN DAYA SAING MASYARAKAT**

**4.1.1. Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas**

1. Untuk mencapai Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan berdaya saing dalam era globalisasi maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang nilai tambah profesionalnya dapat ditawarkan ke ruang persaingan pada skala nasional dan global. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak. Untuk itu pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat. Pertumbuhan penduduk dengan indikan NRR (*Net Reproduction Rate*) sebesar 1 atau TFR NTT sebesar 3,49 harus diturunkan ke 2,1
2. Pertumbuhan penduduk dikendalikan melalui kebijakan angka kelahiran yang dideterminasi oleh angka kematian. Dua variable utama pengendali TFR adalah angka kematian dan kelahiran, kecuali angka migrasi yang bersifat minus. Untuk itu program keluarga berencana harus memperoleh perhatian dan prioritas termasuk program peningkatan kualitas kesehatan reproduksi., Perlu ditingkatkan sediaan sarana program yang terjangkau secara ekonomi dan terakses secara lokal. Kepadatan agraris masih harus disolusi dengan strategi penyebaran yang lebih baik terutama ke dalam ruang domisili baru. Jenis usaha produktif di ruang nafkah lain seperti laut masih perlu diupayakan secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya beli jasa kesehatan. Peningkatan keefektifan, ketransparansian, kemutakhiran, kesahihan mencakup keakuratan dan kepersisan informasi dan data administrasi kependudukan perlu terus ditingkatkan.

3. Pembangunan bidang pendidikan sebagai amanat pendidikan sepanjang hayat diharapkan akan meningkatkan SDM sebagai modal yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan populasi dan kualitas kemiskinan. Upaya pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan sediaan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan dan belajar, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, peningkatan mutu dan daya saing lulusan, meningkatkan relevansi jenis dan jalur pendidikan dan program sesuai permintaan pasar, pemerataan kesempatan belajar terutama bagi kelompok margin. Selain itu, pendidikan secepatnya mengentaskan penduduk buta aksara; pendidikan dasar merupakan hak maka pembebasan biaya pendidikan harus ditegakkan secara konsekuen, kecuali pendidikan tinggi yang merupakan investasi. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berakhlak, bermoral, berkemampuan dan kemauan hidup berdampingan secara toleran dalam kemajemukan dan yang menghargai HAM.
4. Pembangunan kesehatan bertujuan mencapai NTT sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM (IPM) dan peningkatan kesejahteraan manusia Nusa Tenggara Timur melalui menambah sediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM kesehatan menurut jenis keahlian, peningkatan kualitas administrasi dan layanan kesehatan. Upaya pengelolaan kesehatan terkait secara langsung dengan masalah fenomena demografis, lingkungan, epidemiologi penyakit, globalisasi demografi dan mobilisasi IPTEK kesehatan dan kerjasama lintas lembaga.
5. Potensi sumberdaya manusia perempuan Nusa Tenggara Timur perlu dibangun melalui program pendayagunaan kelompok perempuan. Program pendayagunaan penduduk perempuan bertujuan untuk meningkatkan status, peran, tugas, martabat dan harga diri kelompok perempuan yang memungkinkan perempuan berkesempatan mengaktualisasikan dirinya. Pendayagunaan kelompok perempuan juga bertujuan untuk mensejajarkan kelompok perempuan dengan laki-laki agar subordinasi tidak mengendalikan proses aktualisasi dirinya.

Pendidikan kelompok perempuan harus dikembangkan secara wajar melalui semua jalur jenis dan jenjang sehingga kelompok perempuan memiliki kementakan dan aksesibilitas yang lebih besar untuk mencurahkan tenaga, waktu dan keahliannya di semua sector pembangunan. Kelompok perempuan bukan wanita karier yang bekerja dengan upah bernilai non ekonomi harus dihargai sewajarnya, karena curahan waktu dan tenaganya jauh melampaui laki-laki. Keberdayaan perempuan akan berkorelasi negative dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal bertujuan untuk meningkatkan usia kawin pertama yang akan memperkecil paritas.

6. Pembangunan manusia kelompok usia anak dan pemuda perlu dilakukan di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok penduduk ini untuk terentaskan dari eksploitasi tenaga anak usia sekolah di sektor produktif terutama sektor informal. Kelompok pemuda perlu dibinakan untuk memperkuat jatidirinya sebagai pelaku budaya sekaligus untuk memperoleh ketahanan budaya. Program kepemudaan diarahkan bagi peningkatan kualitas kesehatan melalui olahraga selain program ketahanan dan bela negara.

#### **4.1.2. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

1. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan untuk mengabdikan kepada kemanusiaan dan dipergunakan bagi kesejahteraan manusia khususnya dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, industri yang *knowledge based*. Pembangunan teknologi bertujuan agar masyarakat berkemampuan menguasai, mengadopsi, mendesiminasikan dan mendifusi, menciptakan dan mereinventing teknologi yang dipergunakan bagi kebaikan manusia.
2. Pembangunan ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan selain untuk menghasilkan SDM berkualitas dan profesional, juga untuk memperkuat daya saing masyarakat dan bangsa melalui peningkatan

jumlah paten hasil R&D dan ekspor teknologi tinggi/manufaktur, dan untuk meningkatkan besaran kontribusi IPTEK dan SDM terhadap dunia usaha agar > 9,6. Karena siklus satu daur teknologi lebih singkat dari satu periode pendidikan S1 maka ketertinggalan pemahaman dan penguasaan teknologi yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya penguasaan dan penggunaan teknologi kadaluarsa, untuk itu perlu dilakukan percepatan transformasi teknologi dan reinventing teknologi yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, konteks dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

3. Pembangunan IPTEK ditujukan untuk mendukung program produksi pangan, energi, pertahanan keamanan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya. Pengembangan teknologi telekomunikasi dan informatika bertujuan untuk mendukung interaksi global melalui sistem cybernetika dalam cyberspace, mengaktualkan penguasaan IPTEK, merelevansikan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pengembangan IPTEK didukung oleh berbagai jenis penelitian baik yang bersifat dasar, terapan dan pengembangan, karena itu harus ditunjang dengan sarana dan kelembagaan penelitian serta sumberdaya peneliti yang memadai. Pengembangan IPTEK dipergunakan untuk mendukung rekayasa termasuk inovasi di berbagai bidang pembangunan.

#### **4.1.3. Menciptakan Perekonomian yang Kokoh dan Terintegrasi secara Spiralis**

1. Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada integrasi spiralis pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier.
2. Revitalisasi pertanian perlu dikembangkan dalam upaya pengejawantahkan kebijakan pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik

wilayah yang sesuai dengan potensi semiarid dan kelautan Nusa Tenggara Timur serta aspek sosial budayanya.

3. Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih pro pertumbuhan dimana dikedepankan upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Dalam pada itu pendekatan ekologi manusia yang mampu menyelaraskan kaidah-kadaih sosial ekonomi masyarakat dengan kaidah-kaidah ekonomi maju perlu dikembangkan.
4. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada upaya penciptaan angkatan terampil bermotivasi kerja tinggi yang pada gilirannya mencurahkan waktu, daya dan inovasi bagi penciptaan produksi bernilai tinggi yang cukup untuk memutus mata rantai kemiskinan.
5. Pada aspek kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan keteraksesan terhadap lembaga keuangan guna kapitalisasi masyarakat miskin dan pedesaan. Untuk itu, ke depannya perlu diformulasikan dan diimplementasikan sistem perkreditan yang memungkinkan peranan perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi.
6. Pembangunan teknologi diarahkan kepada upaya mekanisasi pedesaan. Terkait dengan hal tersebut adalah upaya diseminasi teknologi tepat guna dan pengembangan bahan bakar nabati untuk kemandirian penyediaan energi pedesaan.
7. Perkuatan perekonomian domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdayasaing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi, penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional

#### **4.1.4. Mengoptimalkan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam**

- 1. Peningkatan Eksplorasi dan Eksploitasi Potensi Tambang.** Pemanfaatan potensi tambang NTT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan sumbangan subsektor pertambangan terhadap PAD. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan potensi tambang untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi tambang NTT. Meningkatkan teknologi dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang. Mendorong investasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan potensi tambang. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum dalam eksplorasi dan eksploitasi potensi tambang.
- 2. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air dan DAS.** Mengatur pemanfaatan sumberdaya air yang berbasis lestari. Menata regulasi pemanfaatan dan pelestarian sumber air. Identifikasi dan pemetaan sumber air potensial. Perlindungan dan rehabilitasi sumber air dan memulihkan sumber air yang mengalami pengrusakan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air. Pembangunan infrastruktur dalam pelestarian air. Konservasi dan rehabilitasi DAS untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya. Pengamanan, pengembangan dan rehabilitasi wilayah sungai dan daerah aliran sungai. Menjaga tangkapan air (catchment area), meliputi: pengukuhan dan penataan batas dan pengendalian kegiatan budidaya. Mengantisipasi terjadinya privatisasi sumberdaya air dimasa mendatang.
- 3. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Kritis.** Mencegah bertambahnya lahan kritis akibat pengrusakan lingkungan dan praktek pertanian/penggunaan lahan yang tidak semestinya. Pemulihan /rehabilitasi lahan kritis dengan penghijauan/reboisasi yang dipadu dengan pengembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Studi dan pemetaan luas dan sebaran lahan kritis. Penyediaan informasi dan publikasi perkembangan dan kondisi lahan kritis. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan lahan kritis.

Mengurangi luas lahan kritis terutama di Sumba Timur, Sumba Barat dan Kupang. Mengurangi luas lahan kritis di DAS. Meningkatkan luas lahan kritis yang direhabilitasi. Memulihkan lahan kritis akibat pertambangan, pembakaran atau kegiatan merusak lainnya melalui reboisasi dan rehabilitasi bersama-sama dengan masyarakat dan swasta. Mengembangkan penelitian dan teknologi penanganan lahan kritis.

- 4. Konservasi dan Optimasi Hasil Hutan.** Pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk konservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Optimasi manfaat hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dan hasil hutan kayu. Penerapan iptek pada sektor kehutanan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan. Pengakuan atas hak ulayat atas hutan. Meningkatkan informasi mengenai perkembangan hutan konservasi dan produksi. Meningkatkan teknologi dan management pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Meningkatkan sumbangan subsektor kehutanan terhadap PAD. Penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya (pertanian dan pertambangan). Perlindungan terhadap kawasan yang mempunyai nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan hutan. Pemberantasan pembalok liar dan penyelundupan kayu. Mencegah kebakaran hutan. Meningkatkan penelitian satwa dan flora langka. Mengembangkan flora dan fauna khas potensial seperti kayu cendana. Pengkajian dan penyusunan model pengembangan dan pengelolaan hutan konservasi, lindung dan produksi berbasis masyarakat. Penataan batas dan pemetaan hutan konservasi, lindung dan produksi. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Melindungi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik lokal. Mencegah pemungutan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi. Melestarikan keanekaragaman hayati secara eksitu dan insitu. Mengembangkan koleksi plasma nutfah dengan mendirikan herbarium di tingkat provinsi. Mencegah introduksi spesies dan varietas eksotis. Mencegah penggunaan teknologi/teknik yang merusak. Mengantisipasi terjadinya Komersialisasi Bahan Hayati seperti tanaman hasil rekayasa genetik atau tanaman *trans genis* dan Bioprospeksi dan Biopirasi. Meningkatkan pemahaman dalam menilai sumberdaya alam.

**5. Optimasi Manfaat Sumberdaya Pesisir dan Laut.** Mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat. Meningkatkan sumbangan subsektor perikanan terhadap PAD. Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut. Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pantai dan pelaku ekonomi terkait. Meningkatkan industri pengolahan hasil laut. Pengebangan, perbaikan dan modernisasi sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Perbaikan teknologi dan manajemen penangkapan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan laut. Menjaga keamanan wilayah laut sebagai suatu teritori multifungsi dan kekayaan lestari dari segala gangguan dan ancaman dalam maupun dari luar. Penegakan hukum bagi pelanggar/perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut. Menjalin kerja sama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut. Meningkatkan Riset, Teknologi dan Informasi di bidang Sumberdaya Pesisir dan Laut. Pemantapan sistem informasi wilayah pesisir dan laut. Meningkatkan teknologi dan manajemen/pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan pesona keindahan alam sebagai provinsi kepulauan. Pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah. Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.



#### **4.1.5. Meningkatkan Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas**

- 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Terminal.** Peningkatan kuantitas dan kualitas fisik jalan, jembatan dan terminal untuk memperlancar mobilitas orang dan barang yang didukung oleh tata ruang yang baik. Pengkajian teknik dan sistem pengelolaan/penanganan jalan, jembatan dan terminal. Meningkatkan jumlah/panjang jalan kategori baik dan mengurangi jalan kategori rusak dan rusak berat, terutama di daerah tertinggal. Mengurangi proporsi jalan kerikil dan tanah dan meningkatkan jalan aspal terutama di daerah tertinggal khususnya di pedesaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membuka beberapa wilayah yang masih terisolasi untuk mengembangkan ekonomi. Mengembangkan sistem transportasi modern di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kota padat.
- 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kendaraan.** Menyelaraskan peraturan perundangan dibidang sarana dan prasarana transportasi darat, baik di bidang investasi maupun peyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha dibidang transportasi. Mendorong peran perbankan dan sumber pendanaan lainnya untuk menunjang investasi dibidang transportasi. Mendorong stakeholder atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana transportasi. Menciptakan cetak biru Sistem Transportasi Wilayah. Meningkatkan jumlah dan kualitas kendaraan untuk mendorong mobilitas penduduk dan barang. Mengembangkan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan. Menetapkan standart kualitas layak jalan kendaraan. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan di tiap ibukota kabupaten/provinsi. Menerapkan sistem pajak lingkungan pada kendaraan untuk mengurangi beroperasinya kendaraan yang tidak layak jalan dan berdampak pada lingkungan. Pengkajian dan penyusunan model perhubungan darat antar wilayah.
- 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.** Meningkatkan arus kunjungan dan arus penumpang kapal laut. Meningkatkan volume bongkar muat barang melalui

pelabuhan laut. Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut di seluruh wilayah NTT. Meningkatkan arus kunjungan dan arus penumpang penyebrangan verry. Meningkatkan volume bongkar muat barang melalui pelabuhan penyebrangan verry. Mengembangkan sinergi sistem perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan transaksi ekonomi antar wilayah. Mengembangkan trasfortasi laut ke pusat-pusat produksi dan pasar. Modernisasi perkapalan dan sarana pelabuhan laut. Meningkatkan peranan transportasi laut untuk mendukung perdagangan dan ekspor import. Mengembangkan transfortasi laut ke beberapa wilayah di Timor Leste dan Australia untuk meningkatkan perdagangan dan parawisata.

- 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Tranfortasi Udara.** Meningkatkan arus kunjungan pesawat terutama pada daerah yang belum berkembang. Pengembangan sarana dan prasarana bandara untuk mendukung transportasi udara. Peningkatan arus penumpang udara dari NTT. Meningkatkan volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara. Meningkatkan route penerbangan pada daerah yang belum berkembang. Mengembangkan status bandara potensial menjadi bandara internasional. Meningkatkan/membuka route penerbangan ke negara tetangga potensial seperti Timor Leste dan Australia. Mengembangkan angkutan komoditi melalui pesawat, khususnya barang-barang segar (fresh good) dan bernilai ekonomi tinggi.
- 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi.** Meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya untuk memanfaatkan sumberdaya air yang ada secara optimal dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktifitas pertanian. Peningkatan lahan beririgasi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut). Meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi dan intensitas tanam. Mengembangkan lahan tidur dan lahan kritis potensial menjadi lahan produktif. Peningkatan luas panen dan produksi padi. Pengkajian dan penyusunan model atau sistem pengairan yan efisien. Perbaikan manajemen dan teknologi pengairan. Pengembangan kelembagaan masyarakat pemakai air.

- 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.** Meningkatkan ketersediaan air bersih sesuai dengan peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Pengkajian dan penyusunan model/sistem distribusi air. Mengembangkan sumber air potensial. Konservasi sumber air khususnya di DAS dan mata-mata air untuk menjaga kelestariannya dan meningkatkan produktifitasnya. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber air. Mendorong keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi. Meningkatkan rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri. Meningkatkan jumlah dan fasilitas kamar mandi umum. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menangani persampahan khususnya diperkotaan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi. Mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan.
- 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Listrik.** Mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain. Meningkatkan jumlah rumah yang mendapat layanan listrik PLN. Mengembangkan penggunaan sumber energi matahari, arus laut, tenaga angin, gas bumi dan lain-lain. Mendorong peranan swasta, badan usaha milik negara, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan listrik terutama listrik non BBM. Mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik BBM melalui penggunaan energi matahari, biodisel, panas bumi, hidro gas, batu bara, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT.
- 8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan.** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Membangun rumah sakit, puskesmas dan sarana-prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kapasitas dan teknologi sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit sesuai dengan standart teknologi kesehatan terkini sehingga mampu menangani jenis penyakit baru dan kejadian luar biasa (KLB) . Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti informasi teknologi dan sarana

pembelajaran lainnya. Merehabilitasi dan merenovasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan sesuai dengan standart mutu layanan pendidikan. Penetapan standart mutu rumah sakit dan lembaga pendidikan sebagai acuan standart minimal pelayanan.

**9. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman.** Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman sesuai dengan tata ruang sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah. Perbaiki kawasan pemukiman terutama di pedesaan dan daerah pesisir pantai. Mendorong investasi swasta dibidang perumahan. Mendorong peranan perbangkan dalam pembangunan perumahan. Meningkatkan sertifikasi tanah dan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah.

**10. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Telekomunikasi/Telematika.** Meningkatkan akses masyarakat terhadap telekomunikasi/telematika. Mencegah disparitas akses terhadap telekomunikasi/telematika antar daerah/wilayah. Meningkatkan sarana dan parasarana telekomunikasi/telematika dibidang pelayanan publik. Meningkatkan jumlah telepon swasta dan pemerintah di daerah yang belum berkembang. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kantor pos terutama di daerah yang belum berkembang. Mendorong investasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi/telematika terutama di daerah potensial yang belum berkembang. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap telekomunikasi/telematika. Mencegah penyalahgunaan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi/telematika.

#### **4.2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT HUKUM YANG DEMOKRATIS**

1. Arah kebijakan hukum berorientasi pada rekonstruksi system hukum. Rekonstruksi struktur merujuk pada rekonstruksi struktur secara nasional dengan tetap membuka peluang bagi akses para pencari keadilan melalui berbagai forum tidak resmi dan melalui berbagai cara yang dipilih sendiri. Forum resmi melegitimasi produk forum tidak resmi sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif.

2. Rekonstruksi substansi hukum meliputi tahap-tahap formulasi, implementasi dan penegakan. Dalam hal formulasi, selain mekanisme baku yang diwajibkan, kajian akademis yang kini dilakukan secara sporadic perlu dibakukan pula.
3. Dalam hal implementasi, kewajiban "prima facie" untuk patuh hanya diwajibkan sejauh ketentuan hukum bertentangan hanya dengan norma atau keyakinan pribadi, namun kewajiban tersebut tidak ada jika ketentuan hukum bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya. Jika bertentangan dengan norma dan atau nilai universal, maka ketentuan hukum dimaksud mesti dianulir.
4. Dalam hal penegakan, sesuai dengan kecenderungan karakter responsive, maka di masa depan kebijakan para fungsionaris hukum mesti lebih diorientasikan pada pemecahan masalah dan perwujudan nilai keadilan. Artinya hukum ditegakkan bukan demi kepentingan penegakan hukum semata melainkan dalam rangka menyelesaikan masalah yang justru menjadi alasannya untuk diformulasikan.
5. Sifat multi dimensi yang inheren dengan gejala pelanggaran HAM di NTT merupakan petunjuk bahwa ini merupakan isu yang mesti didekati dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Setiap strategi yang digunakan mesti disesuaikan dengan konteksnya. Pencelaan terhadap pelaku saja tidak memadai tanpa dibarengi dengan perbaikan posisi tawar para korban [potensial]. Rekonstruksi realitas sosial artificial mesti mencapai tahap kristalisasi dalam pola pikir [mind-set] individu warga masyarakat NTT.

#### **4.3 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG BERKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN**

1. Pluralitas masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah suatu realitas sosio-kultural, ekonomi, politik, hukum, pertahanan - keamanan yang keberadaannya seringkali disalahpahami bahkan cenderung

ditempatkan sebagai sumbu pemicu atau pengganggu keharmonisan sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pluralitas ini seringkali dikorbankan sekaligus juga dimanfaatkan untuk mewujudkan kepentingan sosial, ekonomi, politik, hukum pertahanan dan keamanan masyarakat dari elit-elit tertentu.

2. Dalam era pembangunan 20 tahun kedepan, pemahaman konsep pluralitas ini perlu direformulasi dengan pemahaman yang lebih positif dan konstruktif, karena sebagai suatu realitas, pluralisme pada hakikatnya merupakan suatu anugerah yang diberikan sang Khalik kepada manusia. Pluralisme menghendaki agar setiap manusia hendaknya harus saling asah, asih dan asuh karena setiap manusia memiliki kelebihan sekaligus kekurangan dalam dirinya.
3. Pluralitas adalah bagian yang positif untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik agar bermanfaat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa konflik horizontal yang acapkali terjadi, baik dalam kadar yang kecil maupun besar, pemicunya bukan karena persoalan pluralitas atau pluralisme, melainkan karena masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tidak mampu bersaing secara sehat. Terhadap masalah ini, diharapkan agar untuk pembangunan 20 tahun kedepan peningkatan kualitas SDM dalam berbagai jenis keahlian perlu mendapatkan prioritas utama.
4. Kebudayaan daerah adalah aset pembangunan daerah yang perlu secara terus menerus dipelihara, dibina dan dikembangkan. Seiring dengan hal tersebut, perlu pula diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk makin berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan daerah tersebut dan dalam menikmati hasil-hasilnya. Perlu pula ditumbuh kembangkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
5. Dalam pembangunan politik perlu dikembangkan budaya kompetitif dari semua proses politik maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian output yang dihasilkan dapat selaras dengan nilai-nilai profesionalisme yang diharapkan.

6. Dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan sebaiknya didahului dengan sebuah research yang memadai untuk mendapatkan informasi yang valid sebelum suatu keputusan ditetapkan.
7. Dalam pembangunan daerah kedepan budaya disiplin hendaknya lebih dimasyarakatkan dan dijadikan sebagai sebuah gerakan masyarakat dalam pembangunan daerah.
8. Dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan dan pemborosan pembangunan di daerah maka perlu diberlakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
9. Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan KKN perlu terus diupayakan perwujudannya sekalipun disadari bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang amat luas, rumit, dan kompleks. Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah salah satu prasyarat *good governance*.

#### **4.4 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH BERKESEIMBANGAN LINGKUNGAN**

Terwujudnya NTT yang asri dan lestari yang ditandai membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan lingkungan hidup yang dicerminkan dari terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari dan terjaminnya fungsi lingkungan sebagai penyangga sistem kehidupan. Arah pembangunan jangka panjang NTT 20 tahun ke depan di bidang lingkungan hidup adalah:

1. **Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.** Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk pulau-pulau kecil. Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir dan cadangan mineral. Penyusunan neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup. Penyusunan dan

penerapan produk domestik bruto hijau (PDB Hijau). Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH). Pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional di tingkat daerah. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Pengembangan koordinasi kelembagaan; pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2. **Pengembangan dan Perbaikan Kawasan Konservasi/Lindung.** Memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Penetapan kawasan konservasi atau kawasan lindung di darat dan di laut. Pemantapan kawasan lindung yaitu: meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidroorologis); mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam; menjaga kelestarian lingkungan fisik dan biologis wilayah; menjamin keseimbangan fungsi lingkungan yang menjamin optimalnya fungsi ekologi. Kawasan lindung yang perlu dimantapkan fungsinya adalah kawasan lindung yang telah ditetapkan, kawasan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni namun mempunyai keunikan dan menjadi tempat perlindungan aneka flora dan fauna dan wilayah-wilayah karena posisi geografisnya berpotensi sebagai kawasan lindung. Menyelesaikan masalah tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah antara kepentingan lindung dan budidaya. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.



3. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.** Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama generasi muda sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap SDA dan lingkungan. Mendorong cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan produksi dan konsumsi dan menambah nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
4. **Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.** Mencegah pencemaran lingkungan baik di darat, air dan udara untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemantauan kualitas udara khususnya di perkotaan yang didukung oleh manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan. Pengawasan dan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat provinsi serta fasilitas pemantauan udara (*ambient*) di kota-kota. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam menangani sampah terutama sampah perkotaan dan pendirian perusahaan TPA. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir.
5. **Pemantapan Kinerja Kelembagaan dan Aparatur Pengelola Lingkungan.** Memberdayakan lembaga pengelola lingkungan dalam mengelola lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good environmental governance*) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meningkatkan peran lembaga pengelola lingkungan dalam pengendalian lingkungan hidup. Meningkatkan kemampuan/profesionalisme aparatur lembaga pengelola lingkungan

dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dan manajemen di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar institusi lembaga pengelola lingkungan di Kabupaten/Kota, provinsi; pusat; lintas wilayah dan sektor dalam pengelolaan lingkungan. Pengadaan teknologi dan peralatan yang menunjang fungsi lembaga pengelola lingkungan.

- 6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut.** Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Melindungi jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah. Mencegah pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut. Mengembangkan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum. Memadukan tata pemamfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungan.

#### **4.5 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL, BERETIKA DAN BERBUDAYA**

1. Pembangunan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya meletakkan dasar bagi perwujudan identitas dan karakter pembangunan nasional serta kesadaran budaya yaitu kesadaran terhadap kepelbagaian budaya, suku, ras, agama, golongan untuk membangun toleransi, solidaritas, suasana harmonis dan menghindari benturan, diskriminasi dan friksi.
2. Pembangunan agama untuk menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan agama sebagai peletak moral dan etika pembangunan, membina akhlak, membentuk ethos kerja dan sebagainya. Pembangunan agama akan mendorong toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan hidup berdampingan yang aman dan serasi,
3. Pembangunan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial budaya yang berciri Indonesia yang

meletakkan dasar bagi pembentukan kepribadian yang taat terhadap kode etik bermasyarakat, berprofesi dan berinteraksi dalam berbagai bidang, sekaligus untuk membentuk karakter masyarakat dan aparatur yang bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang bersih.

4. Pembangunan budaya untuk menghasilkan ketahanan budaya dan mengembangkan budaya nasional dan daerah mencakup pembentukan masyarakat religius, pembentukan perilaku budaya, pengembangan kreasi budaya baru baik nasional maupun lokal melalui inovasi budaya, pengembangan kearifan budaya lokal, pelestarian budaya dan pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam kerangka membentuk manusia budaya yang berkeeseimbangan secara material dan spiritual.

#### **4.6 MEWUJUDKAN POSISI DAN PERAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERGAULAN ANTAR WILAYAH DAN MASYARAKAT**

Dengan menginteraksikan arah pembangunan dari berbagai bidang di atas, akan dihasilkan kinerja pembangunan yang menempatkan peran wilayah ini sebagai pemimpin, konsultan, defender, transmitter, katalisator dan dinamisator interaksi antar masyarakat antar provinsi-negara- untuk memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam kerangka mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah di multi dimensi. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi pembangunan antar propinsi maupun dengan dunia internasional perlu diperefektif.